

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukota Tembilahan adalah sebuah daerah dengan perkebunan kelapa terluas di Indonesia bahkan di dunia yang terletak di bagian selatan Provinsi Riau, Daerah ini terkenal dengan julukan “Negeri Seribu Parit” karena daerah ini terdiri dari perairan, sungai, rawa-rawa dan perkebunan kelapa yang dipisahkan oleh ribuan parit.

##### 1. Keadaan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

###### a. Geografis

Tembilahan terletak di pantai timur pulau Sumatera, itu di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas wilayah 18.812,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km<sup>2</sup> dan luas perairan laut 6.318 km<sup>2</sup> dan luas perairan umum 888,97 km<sup>2</sup> serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km<sup>2</sup> berpenduduk kurang lebih 703.734 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis. Kabupaten Indragiri Hilir yang dijuluki “Negeri Seribu Parit” dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa, laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak di ketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan di pengaruhi oleh pasang dan surut.

Secara geografis daerah ini berada pada 0<sup>0</sup>36' LU, 1<sup>0</sup>07 LS dan antara 102<sup>0</sup>32 dan 104<sup>0</sup>10 BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut, daerah hutan puyau (*mangrove*) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6-35 meter diatas permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi pasang surut, apabila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah oleh beberapa sungai dan terusan. Sehingga membentuk gugusan-gugusan pulau.

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tembilahan Kota
2. Kecamatan Tembilahan Hulu
3. Kecamatan Tempuling
4. Kecamatan Pulau Burung
5. Kecamatan Teluk Belengkong
6. Kecamatan Kateman
7. Kecamatan Mandah
8. Kecamatan Pelangiran
9. Kecamatan Gaung
10. Kecamatan Gaung Anak Serka
11. Kecamatan Batng Tuaka
12. Kecamatan Kuala Indragiri
13. Kecamatan Enok

14. Kecamatan Tanah Merah
15. Kecamatan Kemuning
16. Kecamatan Reteh
17. Kecamatan Concong
18. Kecamatan Sungai Batang
19. Kecamatan Kempas
20. Kecamatan Keritang

b. Demografi

Pertumbuhan penduduk kabupaten Indragiri Hilir mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 1993 jumlah penduduknya berjumlah 50.525 jiwa, sementara pada tahun 1997 menjadi 569.591 jiwa atau bertambah sebesar 2,70%. Pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 703.734 jiwa yang terdiri dari sejumlah suku/etnis seperti Banjar dari Kalimantan, Bugis dari Sulawesi, dan Melayu dari Jambi.

c. Fisiografi

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (Pet), daerah hutan puyau (*mangrove*) dan terdiri atau pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.802.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69%, berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan lingkungan tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau.

Sungai yang terbesar didaerah ini adalah sungai Indragiri Hilir, sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu: di Desa Sungai Bela, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok.

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah: Sungai Guntung, Sungai Kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reth, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan Sungai Batang Tamu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada Umumnya telah didiami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi: Pulau Keteman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur, dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut masih terdapat pulau selat-selat/ terusan kecil lainnya seperti: Selat/terusan Kempas, Selat/terusan Tekulai. Selain Selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan lainnya antara lain: Terusan Beringin, Terusan Igal dan lain sebagainya. Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung,



Danau Danai, dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

d. Sosial Budaya

Kondisi budaya di Kabupaten Indragiri Hilir kental dengan budaya Melayu. Terdapat dua budaya yang mempengaruhi penggunaan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Melayu Riau dan Melayu.

Masyarakat Melayu secara tradisional telah memiliki beberapa prinsip fisiologis yang mengatur konsepsi hidup dan kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Melayu telah memasukkan alam sebagai bagian dari kehidupan mereka secara integral. Mereka belajar dari alam untuk kemudian menjadikannya sebagai inspirasi bagi prinsip hidup dan kehidupannya.

**B. Gambaran Umum Satpol PP**

Polisi pamong praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 moto praja wibawa, untuk mewedahi sebagian tugas pemerintahan daerah, sebenarnya tugas ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen

Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP sehingga setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan di peringati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang.

Pada tahun 1962 namanya barulah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No. 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Isitilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja”. Pamong memiliki arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti Kota, Negeri atau Kerajaan. Sehingga secara harafiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota,

Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 tentang Satpol pp memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan

daerah.

Satpol PP disebutkan juga dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegak Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
4. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



#### D. Struktur Organisasi Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber : Kantor Satpol PP kabupaten Indragiri Hilir 2017

#### C. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

- **Visi**

Terwujudnya situasi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif di Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai pusat kegiatan ekonomi regional yang berbasis pertanian dan sumber daya perairan, didukung oleh sumber daya manusia yang mandiri, agamis, sejahtera lahir dan bathin.

- **Misi**

1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat.